

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

TESIS

Oleh:
MARISSA KEMALA DIRGANTINI
201620251010



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

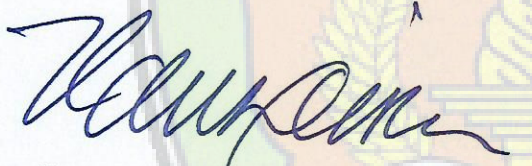
Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh
Korporasi**
Nama Mahasiswa : Marissa Kemala Dirgantini
Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251010
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

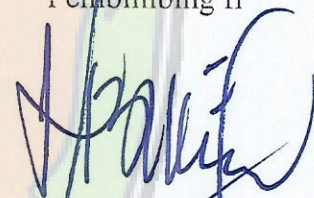
MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM
NIDN : 0323015604



Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH
NIDN : 0323035802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi**
Nama Mahasiswa : Marissa Kemala Dirgantini
Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251010
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

NIDN : 0316077604

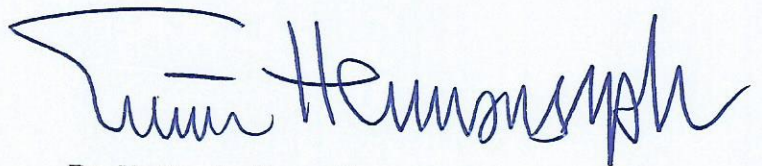
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 6 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Marissa Kemala Dirgantini
201620251010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Selama menempuh penulisan serta penyelesaian tesis ini, penulis banyak memperoleh dukungan baik moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Ir. H. M. Hanafi Darwis, S.H., S.Pd, MM., selaku Pembimbing I, yang dalam kesibukannya dapat menyempatkan membimbing penulis.
2. Bapak DR. Hotma P. Sibuea, SH., MH., selaku Pembimbing II, yang telah sangat sabar dan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmu dan pengalamannya dengan penuh kesabaran kepada penulis.
3. Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Mayor Sus. Sumardjo, S.H., M.H., M.M dan Ibu AKBP. Chaeroni, S.E., M.Si selaku orang tua penulis, serta adik-adik dan orang terkasih yang selalu memberikan doa dan semangatnya demi terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan anugerah yang berlimpah untuk semuanya. Sangat disadari dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, semua saran dan kritik penulis terima dengan ikhlas demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat Indonesia.

Jakarta, 6 Juli 2018

Penulis



Marissa Kemala Dirgantini
NPM : 201620251010

ABSTRAK

Marissa Kemala Dirgantini, 201620251010. PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI. Saat ini pencemaran lingkungan di Indonesia semakin marak terjadi. Bukan hanya terjadi pada perorangan saja tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Persoalan ini semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana di Indonesia tidak hanya melindungi alam, flora, fauna tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja tanggung jawab yang dapat dituntut dari suatu korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan apakah sanksi pidana kurungan lebih baik diterapkan terhadap korporasi dalam rangka mencegah tindak pidana lingkungan hidup. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa tanggung jawab yang dapat dituntut dari suatu korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan untuk mengetahui bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang baik untuk diterapkan terhadap korporasi dalam rangka mencegah tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji aspek tanggung jawab korporasi dan pengusaha yang menjalankan usahanya dengan perusahaan dan bagaimana mengelola lingkungan hidup seiring berjalannya perusahaan sehari-hari melalui pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan tipe penelitian pada aspek hukum. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang diamati dalam konteks realitanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dapat dituntut dari korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan bisa diminta pertanggungjawaban dari: Pertama, hukum pidana karena pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam suatu kejahatan. Kedua, dari hukum perdata, pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang dapat diminta ganti rugi. Ketiga, dalam hukum administrasi, pencemaran lingkungan termasuk dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah. Sehingga sanksi administrasi termasuk dalam kategori pengawasan dari pemerintah kepada korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha dari korporasi tersebut, yang jika ada ketidaksesuaian, maka pemerintah menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling baik diterapkan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi dan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi. Tujuan pembedaan diharapkan mampu menimbulkan efek jera, mencegah korporasi melakukan kejahatan, melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan, melahirkan solidaritas masyarakat untuk menjaga adat istiadat masyarakat yang dapat mencegah balas dendam perorangan. Sehingga saran yang dapat disampaikan adalah mengamandemen beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat menguatkan aturan tegas mengenai korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Kata kunci: pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana, pencemaran lingkungan hidup.

ABSTRAK

Marissa Kemala Dirgantini, 201620251010. LIABILITY OF ENVIRONMENTAL CRIME ACTION WHICH IS CONDUCTED BY CORPORATION. Currently, environmental pollution in Indonesia is increasingly widespread. Not only happen to individual but also done by corporation. This problem is increasingly complex, not only practical, conceptual, economic but also an ethical issue both social and business. The criminal law in Indonesia not only protects nature, flora, fauna but also the future of humanity that is likely to suffer from environmental degradation. This study was conducted to find out what responsibilities can be sued from a corporation that pollutes the environment and whether criminal sanctions are better applied to corporations in order to prevent environmental crime. Where the purpose of this study is to know some of the responsibilities that can be sued from a corporation that pollutes the environment and to know that criminal sanctions are a good sanction to apply against corporations in order to prevent environmental crime. This study examines aspects of corporate responsibility and entrepreneurs who run their business with companies and how to manage the environment as the company goes about its daily basis through a juridical-normative approach, which is the type of research on the legal aspects. In this case the law is conceived as an empirical phenomenon observed in the context of reality. So it can be concluded that the accountability that can be prosecuted from corporations that are proven to pollute the environment can be held accountable from: First, criminal law because environmental pollution is included in a crime. Second, from civil law, environmental pollution is included in unlawful acts that can be indemnified. Third, in administrative law, environmental pollution is included in activities related to the administration of government policy. So that administrative sanctions are included in the category of supervision from the government to the corporation in carrying out the business activities of the corporation, which if there is nonconformity, then the government impose administrative sanctions. Criminal sanctions are the best sanctions applied to tackle environmental pollution by corporations and environmental corporations committed by corporations. The purpose of punishment is expected to create a deterrent effect, prevent corporations from committing crimes, protect people from environmental pollution, create community solidarity to safeguard people's customs that can prevent individual revenge. So the suggestion that can be submitted is to amend some articles in Law Number 32 Year 2009 About Environmental Protection and Management which can strengthen firm rule about corporation which proven to do environmental crime.

Keywords: corporate liability, criminal acts, environmental pollution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Teori	9
1.6 Metode Penelitian	17
1.7 Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indonesia adalah Negara Hukum	25
2.2 Perkembangan Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia	30
2.3 Istilah Hukum Lingkungan	37
2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup	40
2.3.2 Bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup	41
2.4 Teori Pidana	43
2.4.1 Aliran Pertanggungjawaban Pidana	43
2.4.2 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	64
2.5 Masalah Kesalahan Korporasi	67
2.5.1 Kemampuan Tanggung Jawab Korporasi	69
2.5.2 Kesengajaan Dan Kealpaan Korporasi	71

2.6	Teori Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana	74
2.6.1	Teori Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability Theory</i>)	71
2.6.2	Teori Pertanggungjawaban Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>)	91
2.7	Tindakan Preventif dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi	94
2.7.1	Tindakan Pencegahan	95
2.7.2	Tindakan Pengendalian	96

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN YANG DAPAT DITUNTUT DARI KORPORASI YANG TERBUKTI MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1	Pertanggungjawaban Dari Segi Hukum Pidana	97
3.1.1	Pencemaran Lingkungan Sebagai Sebuah Kejahatan	100
3.1.2	Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat Dan Pengruslah yang Bertanggungjawab	102
3.1.3	Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggungjawab	104
3.1.4	Korporasi sebagai Pembuat dan juga sebagai yang Bertanggungjawab	105
3.1.5	Unsur-Unsur Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi	106
3.2	Pertanggungjawaban Dari Segi Hukum Perdata	106
3.3	Pertanggungjawaban Dari Segi Hukum Administrasi	111

**BAB IV SANKSI YANG LEBIH BAIK DITERAPKAN PADA
KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
DILAKUKAN OLEH KORPORASI**

4.1 Analisis	114
--------------------	-----

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	126
5.2 Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

